
Paradoks Dwi Fungsi Pajak Antara Beban atau Manfaat?

Mu'aimin¹, Imahda Khoiri Furqon²

¹UIN K.H. Abdurrahman wahid Pekalongan

¹UIN K.H. Abdurrahman wahid Pekalongan

email: muaiminn@gmail.com¹

imahda.khoiri.furqon@uingusdur.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini membahas dualisme peran pajak sebagai beban atau manfaat bagi masyarakat dalam perspektif ekonomi publik. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur, penelitian ini menganalisis berbagai sumber untuk mengeksplorasi kontradiksi antara pajak sebagai kewajiban yang memberatkan wajib pajak dan pajak sebagai instrumen penting dalam pembiayaan pembangunan negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa pajak, meskipun sering dianggap sebagai beban karena mengurangi pendapatan wajib pajak, memiliki kontribusi besar dalam mendanai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program redistribusi pendapatan. Temuan ini memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana kebijakan perpajakan dapat dirancang untuk mencapai keseimbangan antara memaksimalkan penerimaan negara dan meminimalkan beban wajib pajak, sekaligus memberikan rekomendasi untuk kebijakan yang lebih efektif dan adil dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : beban, manfaat, dan fungsi pajak

PENDAHULUAN

Pajak, sebagai instrumen negara untuk membiayai pengeluaran publik, seringkali dianggap sebagai beban bagi wajib pajak. Namun, di sisi lain, pajak juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Kontradiksi antara peran pajak sebagai beban atau manfaat ini menjadi isu menarik dalam kajian ekonomi publik. Bagaimana pajak dapat menjadi keduanya sekaligus? Paragraf ini akan mengupas lebih dalam mengenai dualisme peran pajak tersebut. Pajak, meski seringkali dipandang sebagai kewajiban yang memberatkan, sejatinya memiliki peran krusial dalam pembangunan suatu negara. Melalui pajak, pemerintah dapat menyediakan berbagai layanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan kesehatan. Namun, di balik manfaatnya, pajak juga menimbulkan beban bagi wajib pajak. Paragraf ini akan mengelaborasi lebih lanjut mengenai keseimbangan antara beban atau manfaat pajak.

Pajak, sebagai kewajiban yang harus ditanggung oleh setiap warga negara, seringkali dianggap sebagai beban yang memberatkan. Tingginya tarif pajak dan kompleksitas sistem perpajakan dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, pajak juga merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting untuk membiayai berbagai program pembangunan. Paragraf ini akan membahas lebih lanjut mengenai dampak pajak sebagai beban bagi wajib pajak. Pajak, sebagai instrumen fiskal yang paling efektif, memiliki dua wajah yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, pajak merupakan beban bagi wajib pajak karena mengurangi pendapatan yang dapat digunakan untuk konsumsi atau investasi. Di sisi lain, pajak juga merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting untuk membiayai berbagai program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Bagaimana cara mencapai keseimbangan antara beban atau manfaat pajak? Paragraf ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai isu tersebut.

Pajak adalah tulang punggung keuangan negara yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sayangnya, masih banyak warga negara yang enggan memenuhi kewajiban perpajakannya. Padahal, pembayaran pajak adalah bentuk kontribusi nyata bagi pembangunan negeri. Masalah ketidakpatuhan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi tantangan global. Akibatnya, negara kehilangan

potensi pendapatan yang sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan rakyat. Pajak itu penting buat negara kita agar bisa membangun jalan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Tapi, banyak orang yang masih belum mau bayar pajak. Padahal, bayar pajak itu kewajiban kita sebagai warga negara. Kalau banyak yang enggak bayar pajak, negara jadi kekurangan uang untuk pembangunan. Masalah ini bukan cuma ada di Indonesia, tapi juga di negara lain. Pajak adalah sumber utama pendapatan negara untuk membiayai berbagai program pembangunan. Namun, rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak membuat negara kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Akibatnya, pembangunan menjadi terhambat dan kesejahteraan masyarakat pun terancam. Seharusnya, pajak menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, karena banyak orang yang tidak patuh membayar pajak, tujuan mulia ini sulit tercapai. Kurangnya kesadaran, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, dan kompleksitas peraturan pajak seringkali menjadi penyebab utama masalah ini. Hasil penelitian ini akan memberikan dasar untuk penelitian lebih lanjut tentang kontradiksi antara apakah pajak sebagai beban bagi masyarakat ataupun sebagai manfaat untuk masyarakat. Temuan yang diperoleh dapat digunakan untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana peran pajak bagi pemerintah maupun bagi masyarakat. berdasarkan temuan penelitian, saran dan rekomendasi akan diberikan untuk memberikan penjelasan lebih dalam esensi pajak bagi pemerintah dan masyarakat. kesimpulan dari penelitian ini merangkum temuan utama mengenai eksistensi pajak sebagai manfaat bagi masyarakat..

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk menganalisis dualisme peran pajak sebagai beban atau manfaat bagi masyarakat. Penelitian ini mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan, untuk menggali konsep-konsep dasar dan teori-teori

terkait pajak dalam konteks ekonomi publik. Penulis akan meninjau berbagai pandangan mengenai pajak, baik sebagai kewajiban yang memberatkan wajib pajak maupun sebagai instrumen penting untuk pembiayaan pembangunan negara. Melalui analisis komparatif dan sintesis dari literatur yang ada, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai keseimbangan antara beban atau manfaat pajak serta memberikan rekomendasi mengenai kebijakan perpajakan yang lebih efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

PEMBAHASAN

Definisi Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara atau badan usaha kepada negara. Pungutan ini bersifat memaksa dan diatur oleh undang-undang. Meskipun tidak ada imbalan langsung yang didapatkan, pajak memiliki peran yang sangat penting bagi negara. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan negara, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dengan kata lain, pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hefferan, 2020).

Jenis pajak sangat beragam, mulai dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak barang mewah, hingga pajak bumi dan bangunan. Setiap jenis pajak memiliki objek dan tarif yang berbeda-beda. Sebagai contoh, pajak penghasilan dikenakan atas pendapatan seseorang atau badan usaha, sedangkan PPN dikenakan atas konsumsi barang atau jasa. Kewajiban membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara yang baik. Dengan membayar pajak, kita turut serta berkontribusi dalam pembangunan negara dan menikmati hasil pembangunan tersebut. Selain itu, membayar pajak juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh warga negara atau badan usaha kepada negara. Ini merupakan kewajiban konstitusional yang diatur dalam undang-undang. Dana yang terkumpul dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan negara, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik (kesehatan, pendidikan,

keamanan), dan juga untuk menstabilkan perekonomian. Pajak adalah tulang punggung keuangan Negara (Ariffin & Sitabuana, 2022). Tanpa pajak, pemerintah tidak akan memiliki sumber pendapatan yang cukup untuk menjalankan fungsinya. Selain itu, pajak juga digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, seperti redistribusi pendapatan, melindungi industri dalam negeri, atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Jenis-jenis Pajak Secara garis besar, pajak dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang langsung ditanggung oleh pihak yang dikenakan pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang umumnya ditanggung oleh konsumen akhir.

Prinsip-prinsip Perpajakan Sistem perpajakan yang baik didasarkan pada beberapa prinsip, antara lain keadilan, yaitu beban pajak harus adil dan sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak kepastian hukum, yaitu peraturan perpajakan harus jelas dan tidak menimbulkan keraguan, efisiensi, yaitu biaya administrasi perpajakan harus seminimal mungkin dan ekuitas, yaitu beban pajak harus merata di antara wajib pajak. Manfaat Membayar Pajak Membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga memiliki banyak manfaat. Dengan membayar pajak, kita turut serta membangun negara, menikmati hasil pembangunan, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan juga dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan diri kita sebagai warga negara yang baik (Rahmat, 2015).

Pajak dalam ekonomi merupakan instrumen yang sangat vital. Ia bukan sekadar pungutan wajib, melainkan mekanisme krusial dalam mengelola sumber daya suatu negara. Pajak adalah aliran pendapatan yang mengalir dari sektor privat (warga negara dan badan usaha) ke sektor publik (pemerintah). Dana yang terkumpul kemudian digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan negara, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pelayanan publik. Fungsi pajak dalam ekonomi sangat beragam.

Paradoks Dwi Fungsi Pajak Antara Beban atau Manfaat

Pertama, pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan utama negara. Tanpa pajak, pemerintah akan kesulitan membiayai berbagai program dan proyek yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, pajak berperan sebagai alat stabilisasi ekonomi. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat menggunakan pajak untuk mengatur tingkat permintaan agregat dan inflasi. Ketiga, pajak juga berfungsi sebagai alat redistribusi pendapatan. Pajak progresif, misalnya, dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin.

Dampak pajak terhadap ekonomi sangat kompleks dan bergantung pada berbagai faktor, seperti jenis pajak, tarif pajak, dan struktur ekonomi. Secara umum, pajak dapat memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi publik, meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, dan mengurangi ketimpangan. Namun, pajak yang terlalu tinggi atau tidak efisien dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi daya saing, dan menimbulkan distorsi pasar. Dalam konteks ekonomi global, perpajakan juga menjadi isu yang semakin kompleks. Persaingan global mendorong negara-negara untuk merancang sistem perpajakan yang menarik investasi asing langsung. Selain itu, isu penghindaran pajak dan elusi pajak juga menjadi tantangan besar bagi banyak negara. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama internasional untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan efektif dalam era globalisasi.

Fungsi Pajak Dalam Pembangunan Public

Pajak merupakan tulang punggung keuangan negara. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan, hingga penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dengan kata lain, pajak adalah kontribusi wajib dari masyarakat yang kemudian diinvestasikan kembali untuk kepentingan bersama. Melalui pajak, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional. pajak berperan dalam membiayai sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Harahap et al., 2024)

1. Pendidikan

Pembangunan sekolah dan fasilitas Pendidikan Dana pajak digunakan untuk membangun dan memperbaiki sekolah, menyediakan perlengkapan belajar, serta membangun laboratorium dan perpustakaan. Pembayaran gaji guru: Guru adalah ujung tombak pendidikan. Pajak digunakan untuk membayar gaji guru, sehingga negara dapat memastikan ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas. Beasiswa dan bantuan pendidikan: Bagi siswa yang kurang mampu, pajak digunakan untuk menyediakan beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan. Program peningkatan kualitas pendidikan Dana pajak juga dialokasikan untuk program-program yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, seperti pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan penelitian pendidikan (Wahyuni et al., 2023)

2. Kesehatan

Pembangunan rumah sakit dan puskesmas: Pajak digunakan untuk membangun dan memperbaiki rumah sakit serta puskesmas, sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih mudah terhadap layanan kesehatan. Pembelian alat Kesehatan Dana pajak digunakan untuk membeli peralatan medis yang dibutuhkan rumah sakit dan puskesmas, seperti mesin X-ray, alat bedah, dan obat-obatan. Pembayaran gaji tenaga medis Dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya digaji menggunakan dana pajak. Hal ini memastikan ketersediaan tenaga kesehatan yang cukup untuk melayani masyarakat. Program kesehatan masyarakat Pajak digunakan untuk membiayai program-program kesehatan masyarakat, seperti imunisasi, penyuluhan kesehatan, dan pemberantasan penyakit menular (Berliana, 2021).

3. Infrastruktur

Pembangunan jalan, jembatan, dan bendungan Infrastruktur yang baik sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bendungan, dan pelabuhan. Penyediaan transportasi

Paradoks Dwi Fungsi Pajak Antara Beban atau Manfaat

umum Dana pajak digunakan untuk membangun dan mengoperasikan transportasi umum, seperti bus, kereta api, dan kereta bawah tanah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Pembangunan sistem irigasi: Sistem irigasi yang baik sangat penting untuk pertanian. Pajak digunakan untuk membangun dan memperbaiki sistem irigasi, sehingga sektor pertanian dapat berkembang dengan baik. Pajak berperan sangat penting dalam membiayai sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan membayar pajak, kita turut serta berkontribusi dalam membangun negara yang lebih baik. Fasilitas pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang terjangkau, dan infrastruktur yang memadai adalah hak setiap warga negara. Melalui pajak, pemerintah dapat mewujudkan hak-hak tersebut.

Pajak untuk mengatur distribusi pendapatan dan memperkecil kesenjangan Pajak bukan hanya sekadar kewajiban finansial, tetapi juga merupakan instrumen kebijakan yang kuat untuk mengatur distribusi pendapatan dalam suatu negara. Melalui sistem perpajakan yang progresif, pemerintah dapat meredistribusikan kekayaan dari kelompok masyarakat yang lebih mampu ke kelompok yang kurang mampu (Mukhlis, 2019). Sistem pajak progresif menerapkan tarif pajak yang berbeda-beda berdasarkan tingkat penghasilan. Semakin tinggi penghasilan seseorang, semakin tinggi pula tarif pajak yang harus dibayarkan. Dengan kata lain, orang kaya akan dikenakan pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang miskin. Selisih pendapatan dari pajak yang lebih tinggi ini kemudian dapat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai program-program sosial yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti bantuan sosial, subsidi, dan pelayanan kesehatan gratis (Herlinawati, 2020).

Tujuan utama dari redistribusi pendapatan melalui pajak adalah untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengurangi kesenjangan, stabilitas sosial dan politik suatu negara dapat terjaga. Selain itu, redistribusi pendapatan juga dapat meningkatkan produktivitas ekonomi karena masyarakat yang memiliki akses yang lebih merata terhadap sumber daya akan memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk bekerja dan berinovasi (Naharto & Tjondro, 2014)

Tantangan dalam Implementasi meskipun pajak progresif memiliki potensi yang besar dalam mengurangi ketimpangan, implementasinya dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah penghindaran pajak oleh kelompok masyarakat yang kaya (Syarifudin, 2018). Selain itu, perancangan sistem pajak yang adil dan efektif juga membutuhkan kajian yang mendalam dan melibatkan berbagai pihak. Pajak merupakan alat yang ampuh untuk mengatur distribusi pendapatan dan memperkecil kesenjangan. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan pajak progresif sangat bergantung pada desain sistem pajak yang baik, penegakan hukum yang tegas, dan komitmen pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial. Dengan demikian, pajak tidak hanya menjadi sumber pendapatan negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera (Herlinawati, 2020)

Pajak sebagai Alat untuk Mencapai Tujuan Pemerintah ,pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang sangat krusial dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan pemerintahan. Selain sebagai sumber pendapatan, pajak juga berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mencapai berbagai tujuan kebijakan pemerintah. Melalui mekanisme perpajakan, pemerintah dapat mengarahkan sumber daya ekonomi untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan (Cindy, 2023) Fungsi utama pajak adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, pajak menjadi instrumen penting dalam menyediakan layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan pajak untuk mendorong atau menghambat aktivitas ekonomi tertentu. Misalnya, dengan memberikan insentif pajak, pemerintah dapat mendorong investasi di sektor-sektor tertentu. Sebaliknya, dengan menaikkan tarif pajak atas suatu produk, pemerintah dapat mengurangi konsumsi produk tersebut. Melalui sistem perpajakan yang progresif, pemerintah dapat mencapai tujuan

keadilan social (Cookson & Stirk, 2019). Pajak progresif menerapkan tarif pajak yang lebih tinggi bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dengan demikian, kesenjangan pendapatan dapat diperkecil dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Selain itu, pajak juga dapat digunakan untuk memberikan perlindungan sosial kepada kelompok masyarakat yang rentan, seperti orang miskin, orang tua, dan penyandang disabilitas. Pajak memiliki peran yang sangat strategis dalam mencapai tujuan-tujuan pemerintah. Selain sebagai sumber pendapatan negara, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi, mencapai keadilan sosial, dan mendorong pembangunan nasional. Oleh karena itu, perancangan dan implementasi sistem perpajakan yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Mukhlis, 2019)

Dinamika Antara Pemerintah Yang Berusaha Memaksimalkan Penerimaan Pajak Dan Wajib Pajak Yang Berusaha Meminimalkan Beban Pajak.

Perbedaan tujuan yang fundamental pemerintah memiliki tujuan utama yaitu memaksimalkan penerimaan pajak. Pendapatan dari pajak sangat krusial untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Semakin besar penerimaan pajak, semakin banyak program yang dapat dijalankan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pajak adalah untuk membiayai berbagai pengeluaran publik yang dibutuhkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membangun dan memelihara infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya (Mukhlis, 2019). Selain itu, pajak juga digunakan untuk membiayai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Penerimaan pajak yang stabil sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Fluktuasi pendapatan negara yang signifikan dapat menyebabkan ketidakpastian dan mengganggu kegiatan ekonomi. Dengan memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah dapat menciptakan cadangan dana yang cukup untuk menghadapi situasi darurat, seperti bencana alam atau krisis ekonomi. Pemerintah juga menggunakan

pajak sebagai alat untuk mencapai keadilan social (Ariesy Tri Mauleny, Nidya Waras Sayekti, Edmira Rivani, Venti Eka Satya, 2021). Melalui sistem pajak progresif, pemerintah dapat mendistribusikan pendapatan dari kelompok masyarakat yang lebih mampu ke kelompok masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian, kesenjangan pendapatan dapat diperkecil dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Selain itu, pajak juga dapat digunakan untuk memberikan perlindungan sosial kepada kelompok masyarakat yang rentan, seperti orang miskin, orang tua, dan penyandang disabilitas. Memaksimalkan penerimaan pajak merupakan tujuan fundamental bagi pemerintah. Melalui pajak, pemerintah dapat membiayai pengeluaran publik, mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi, dan mencapai keadilan sosial. Oleh karena itu, perancangan dan implementasi sistem perpajakan yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional.

Wajib Pajak memiliki tujuan sebaliknya, wajib pajak cenderung ingin meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Pajak dianggap sebagai biaya yang mengurangi keuntungan atau penghasilan. Oleh karena itu, wajib pajak akan berusaha mencari cara-cara yang legal untuk mengurangi beban pajak, seperti memanfaatkan berbagai fasilitas atau insentif pajak yang disediakan pemerintah. tujuan fundamental mengapa wajib pajak umumnya ingin meminimalkan pembayaran pajak yaitu untuk memaksimalkan keuntungan. tujuan utama setiap entitas ekonomi, baik individu maupun perusahaan, adalah memaksimalkan keuntungan. Pajak merupakan pengeluaran yang mengurangi keuntungan (Dan, 2014). Oleh karena itu, wajar jika wajib pajak berusaha untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan agar keuntungan yang diperoleh menjadi lebih besar. Dengan kata lain, membayar pajak yang lebih rendah berarti lebih banyak dana yang dapat digunakan untuk investasi, pengembangan bisnis, atau konsumsi pribadi. Motivasi Ekonomi Pembayaran pajak dapat mengurangi daya beli masyarakat. Ketika pajak yang harus dibayar semakin tinggi, maka jumlah uang yang tersisa untuk dibelanjakan akan semakin sedikit. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan

Paradoks Dwi Fungsi Pajak Antara Beban atau Manfaat

ekonomi karena permintaan akan barang dan jasa menjadi menurun (Putra & Gunardie, 2024). Oleh karena itu, wajib pajak cenderung mencari cara untuk meminimalkan beban pajak agar daya belinya tetap terjaga dan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Kepatuhan terhadap Peraturan Meskipun ingin meminimalkan pajak, wajib pajak yang taat pada hukum akan berusaha mencari cara yang legal untuk mencapai tujuan tersebut. Mereka akan memanfaatkan berbagai fasilitas dan insentif pajak yang disediakan oleh pemerintah, seperti pengurangan pajak atas penghasilan tertentu atau kredit pajak untuk investasi. Dengan demikian, wajib pajak dapat mengurangi beban pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Putra & Gunardie, 2024). Keinginan wajib pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak adalah hal yang wajar dan dapat dipahami. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah perlu merancang sistem perpajakan yang adil dan efisien, serta memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak agar tujuan bersama, yaitu pembangunan negara, dapat tercapai.

Perbedaan tujuan antara pemerintah dan wajib pajak ini menciptakan dinamika yang menarik. Di satu sisi, pemerintah berupaya merancang sistem perpajakan yang efektif dan efisien untuk memaksimalkan penerimaan. Di sisi lain, wajib pajak berusaha mencari celah-celah hukum untuk mengurangi beban pajak. dinamika menarik antara pemerintah dan wajib pajak dalam konteks perpajakan hubungan antara pemerintah dan wajib pajak dalam konteks perpajakan adalah sebuah dinamika yang menarik dan terus berkembang (Dan, 2014). Di satu sisi, pemerintah memiliki tujuan untuk merancang sistem perpajakan yang efektif dan efisien guna memaksimalkan penerimaan negara. Sistem pajak yang baik diharapkan dapat membiayai berbagai program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, wajib pajak memiliki motivasi untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. Hal ini didorong oleh keinginan untuk memaksimalkan keuntungan atau kekayaan pribadi.

Di jantung sistem perpajakan, terdapat perbedaan mendasar antara tujuan pemerintah dan wajib pajak. Pemerintah berorientasi pada memaksimalkan penerimaan negara melalui pajak. Pendapatan pajak ini sangat krusial untuk membiayai berbagai

program pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Semakin besar penerimaan pajak, semakin banyak program yang dapat dijalankan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, wajib pajak cenderung ingin meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Pajak dianggap sebagai pengeluaran yang mengurangi keuntungan atau penghasilan (Sinaga & Rivani, 2018). Oleh karena itu, wajib pajak akan berusaha mencari cara-cara yang legal untuk mengurangi beban pajak, seperti memanfaatkan berbagai fasilitas atau insentif pajak yang disediakan pemerintah. Konsekuensi yang ada Jika pemerintah terlalu agresif dalam meningkatkan tarif pajak atau memperketat pengawasan, hal ini dapat membebani wajib pajak dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kebijakan perpajakan yang terlalu kompleks dapat menimbulkan ketidakpastian dan meningkatkan biaya administrasi bagi wajib pajak (Putra & Gunardie, 2024)

Dinamika ini memiliki beberapa konsekuensi yang perlu diperhatikan. Jika pemerintah terlalu ketat dalam menerapkan aturan perpajakan, hal ini dapat membebani wajib pajak dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika pemerintah terlalu longgar dalam pengawasan, maka akan banyak wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak (Cindy, 2023). Hal ini dapat mengurangi penerimaan negara dan mengganggu stabilitas ekonomi. Untuk mencapai keseimbangan, diperlukan upaya dari kedua belah pihak. Pemerintah perlu merancang sistem perpajakan yang adil, sederhana, dan efektif. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan kepastian hukum dan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Di sisi lain, wajib pajak diharapkan untuk taat pajak dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Dinamika antara pemerintah dan wajib pajak dalam konteks perpajakan adalah suatu hal yang wajar. Perbedaan tujuan antara keduanya menciptakan sebuah dinamika yang menarik dan kompleks. Untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pembangunan negara yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dan wajib pajak. Pajak adalah sumber utama pendanaan bagi pemerintah untuk menjalankan

fungsi-fungsi pemerintahannya, Pemerintah juga memaksimalkan penerimaan pajak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (Cindy, 2023). Dana yang diperoleh dari pajak dapat digunakan untuk memberikan insentif kepada sektor swasta, seperti pengurangan pajak atau pemberian fasilitas kredit, sehingga mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, pajak juga dapat digunakan untuk membiayai penelitian dan pengembangan, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi suatu negara. Hubungan antara pemerintah dan wajib pajak dalam hal perpajakan adalah hubungan yang dinamis dan saling mempengaruhi. Pemerintah perlu menyeimbangkan antara kebutuhan untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan keinginan wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak. Dengan demikian, sistem perpajakan yang baik dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pajak adalah kewajiban yang harus dibayar oleh warga negara atau badan usaha kepada negara, yang bertujuan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Pajak memiliki dua jenis utama, yaitu pajak langsung (ditanggung langsung oleh wajib pajak, seperti PPh dan PBB) dan pajak tidak langsung (ditanggung oleh konsumen, seperti PPN). Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara yang vital, berperan dalam stabilisasi ekonomi, dan sebagai alat untuk mendistribusikan pendapatan agar mengurangi ketimpangan sosial. Melalui sistem pajak progresif, pemerintah dapat memungut pajak lebih tinggi dari kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi untuk kemudian membiayai program sosial yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Penulis berharap akan ada penulislain yang bersedia meneliti lagi perihal bagaimana pajak berkontribusi padaperekonomian suatu wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariesty Tri Mauleny, Nidya Waras Sayekti, Edmira Rivani, Venti Eka Satya, L. S. (2021). Optimalisasi dan Penguatan Perpajakan Indonesia. In *Www.Obor.or.Id*.
https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/buku_lintas_tim/buku-lintas-tim-public-42.pdf
- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Serina IV Untar*, 28, 523–534.

- Berliana, N. (2021). Landasan Teori ادیدج. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 18.
- Cindy, C. (2023). Polemik Pemungutan Pajak di Indonesia. *Indonesia Journal of Business Law*, 2(1), 38–46. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.2030>
- Cookson, M. D., & Stirk, P. M. R. (2019). Tinjauan Atas Penerapan Self Assessment System PPh Orang Pribadi Di KPP Pratama Makassar Selatan. *Jurnal Ilmiah*, 1–49.
- Dan, P. P. (2014). Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1), 142–157. <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.128>
- Harahap, F. A., Lubis, N. A., & Vientiany, D. (2024). *Tantangan Dan Strategi Penegakan Hukum Pajak Di Era Digital*. 01(04), 1034–1038.
- Hefferan, M. J. (2020). Valuation theory and applications. In *Real Property in Australia*. <https://doi.org/10.1201/9781003041788-10>
- Herlinawati, Y. (2020). *Modul Pajak Ekonomi Kelas XI*. 1–35.
- Mukhlis, I. (2019). Pentingnya Kepatuhan Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Finansia*, 13.
- Naharto, M. J., & Tjondro, E. (2014). Analisis Tujuan Pemungutan Serta Pengertian Penghasilan Menurut Perpajakan Dan Persepuluhan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Perta*, 4(1), 1–14.
- Putra, K., & Gunardie, S. (2024). *Hukum Pajak dan Tantangan dalam Pemungutan Pajak*. 2(2), 1335–1345.
- Rahmat, R. (2015). Pengelolaan Pajak Reklame di Kabupaten Pangkep. *PPKn FIS*, 1(1), 185–193.
- Sinaga, D. S., & Rivani, E. (2018). *PENETAPAN TARIF KEPABEANAN E-COMMERCE barang . Bisnis digital di Indonesia rata - rata tumbuh membawa perkembangan dunia digital secara radikal dalam memenuhi kebutuhan manusia atas barang dan jasa . Dalam kurun waktu satu dekade terakhir Surabaya , Bandu*. 1–16.
- Syarifudin, A. (2018). Buku Ajar Perpajakan. *STIE Putra Bangsa*, 4(1), 1–251.
- Wahyuni, F., Nusantara, U. I., Fiskal, K., & Pajak, A. (2023). *Artikel Reformasi Hukum Pajak Di Indonesia : Tantangan Dan*. 6(2), 80–95.